

PENYUSUNAN ROADMAP PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM KABUPATEN LAMONGAN

Danar Guruh Pratamomo¹, Arip Rohman Soleh² dan Muhammad Irfan Rizaldi³

¹Direktorat Kerjasama dan Pengelola Usaha (DKPU), Institut Teknologi Sepuluh Noverber, Gedung Research Center Lt. 3 Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111

Email: dkpu@its.ac.id

^{2,3}Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Jl. K.H. Achmad Dahlan Nomor 1 Lamongan

Email: bageko@lamongan.go.id

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah segmen usaha yang berpotensi untuk berkembang dan menjadi salah satu tulang punggung pembangunan ekonomi daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Lamongan. Keseriusan Pemkab Lamongan memberikan pembinaan dan penguatan kepada 1.349 Koperasi dan 254.206 Usaha Mikro mampu mengantarkan Bupati Lamongan untuk meraih penghargaan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Pembina Koperasi Terbaik di Jatim pada Harlah Koperasi ke-75 pada bulan Juli 2022 Oleh Gubernur Jawa Timur. Berdasarkan hasil telaah permasalahan dan potensi berdasarkan kinerja *existing*, memperhatikan capaian indikator SDG's untuk pemenuhan target pada tujuan pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan isu strategis prioritas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, serta hasil consensus atau kesepakatan antar stakeholder dan telah melewati forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan serta pembahasan bersama DPRD, maka rumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: Tingginya potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi kontribusi sektor pertanian, perdagangan, Industri, UMKM dan Pariwisata. Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan peta jalan/ roadmap UMKM Kabupaten Lamongan Tahun 2023-2026 dibagi dalam tahapan yaitu penguatan kelembagaan, produktivitas dan aksesibilitas UMKM, akselerasi digitalisasi UMKM, dan pengembangan UMKM berkelanjutan.

Kata kunci: Lamongan, UMKM, Tingginya potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi kontribusi sektor pertanian, perdagangan, industri, UMKM dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is a business segment that has the potential to grow and become one of the backbones of regional economic development, and Lamongan Regency is no exception. The seriousness of the Lamongan Regency Government in providing guidance and strengthening to 1,349 Cooperatives and 254,206 Micro Enterprises was able to deliver the Lamongan Regent to win the award for the Best Cooperative Fostering Regency / City Head in East Java at the 75th Cooperative Anniversary in July 2022 by the Governor of East Java. Based on the results of the review of problems and potentials based on existing performance, paying attention to the achievement of SDG's indicators to fulfill targets on sustainable development goals and paying attention to the priority strategic issues of the RPJMD Strategic Environmental Assessment (KLHS), as well as the results of consensus or agreement between stakeholders and have passed public consultation forums and development planning deliberations and discussions with the DPRD, the formulation of the strategic issues of the RPJMD of Lamongan Regency for 2021-2026 are as follows: The high potential for increasing economic growth through accelerating the contribution of the agriculture, trade, industry, MSMEs and tourism sectors. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the roadmap for MSMEs in Lamongan Regency for 2023-2026 is divided into stages, namely institutional strengthening, productivity and accessibility of MSMEs, acceleration of MSME digitalization, and sustainable MSME development.

Keywords: Lamongan, UMKM, High potential for increasing economic growth through accelerating the contribution of the agricultural, trade, industrial, UMKM and tourism sectors of Lamongan Regency.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah segmen usaha yang berpotensi untuk berkembang dan menjadi salah satu tulang punggung pembangunan ekonomi daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Lamongan (Zaelani, 2019). Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah untuk Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas nasional, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam pembangunan saat ini dan dimasa mendatang adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Keberadaan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (Nasution, 2020).

Hal ini senada dengan rencana strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dalam program prioritasnya yakni Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa (Sopian, 2023). Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dimana mayoritas pelaku ekonominya adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat berkepentingan untuk melakukan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha untuk mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya (Marlinah, 2020). Prinsip-prinsip dasar pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada tingkat provinsi, Undang-Undang No 20 tahun 2008 telah diterjemahkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 4 Tahun 2007 tentang pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kemudian dievaluasi menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dan mestinya Langkah ini dapat

dilanjutkan pada pemerintah kabupaten atau kota di wilayah Jawa Timur (Abas, 2020).

Begitu pula pada Pemerintah Kabupaten Lamongan yang memiliki visi “Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”, dimana salah satu misi yang diusung untuk mewujudkan visi tersebut adalah Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan mengoptimalkan berbagai potensi serta sektor unggulan, pengetahuan industri kecil dan menengah, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*startup*). Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan bermaksud untuk memacu perkembangan UMKM di wilayahnya dengan menyediakan program pengembangan UMKM yang bertujuan untuk membantu UMKM untuk berkembang menjadi salah satu penopang pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Lamongan. Dengan beberapa program kerja seperti Lamongan Kreatif Pesantren Kreatif (*Santripreneurship*), Bantuan Modal Pendampingan dan Pemasaran, Gerakan Membeli Produk Lamongan, Revitalisasi Pasar Desa, Membangun Sentra UMKM Lamongan.

Identifikasi produk unggulan merupakan awal dalam perencanaan pembangunan ekonomi lokal. Menurut Tarigan (2009) analisis potensi ekonomi lokal berkaitan dengan penentuan sektor-sektor riil yang perlu dikembangkan agar perekonomian lokal tumbuh pesat. Dengan teridentifikasinya produk unggulan daerah akan mempermudah stakeholder mengambil langkah strategis dalam memajukan setiap daerah.

Keseriusan Pemkab Lamongan memberikan pembinaan dan penguatan kepada 1.349 Koperasi dan 254.206 Usaha Mikro mampu mengantarkan Bupati Lamongan untuk meraih penghargaan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Pembina Koperasi Terbaik di Jatim pada Harlah Koperasi ke-75 pada bulan Juli 2022 Oleh Gubernur Jawa Timur. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan yang tidak mudah, dalam mempertahankan eksistensi koperasi dan UMKM di tengah kondisi yang tidak menentu saat ini, mulai dari pandemi Covid-19 hingga persaingan usaha yang kian ketat, sehingga mengharuskan koperasi dan UMKM melakukan berbagai inovasi agar tetap mendapat tempat dihati masyarakat.

Hal diatas merupakan komitmen dan pewujudkan visi dan misi khususnya “mewujudkan kemandirian ekonomi daerah

melalui optimalisasi potensi unggulan daerah” dengan 11 program unggulan / prioritas salah satunya adalah Meningkatkan Kapasitas UMKM Naik Kelas. Untuk mewujudkan hal tersebut sudah banyak program yang telah dilaksanakan Pemkab Lamongan oleh beberapa OPD yang terus berusaha meningkatkan Kapasitas UMKM naik kelas dengan berbagai kegiatan sejak 2021 yaitu :

- a. Pelatihan kewirausahaan mandiri UMKM (2021), hasil Kerjasama dengan retail modern dan beberapa bank di Lamongan. Diharapkan pelatihan ini mampu mempercepat pencapaian kesejahteraan UMKM melalui dukungan permodalan dan pemasaran yang lebih luas.
- b. Percepatan dan penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah pada UMKM (2021)., dengan program ini diharapkan bersifat produktif misalnya sebagai penambah modal agar UMKM naik terus dan bersifat kontinyu.
- c. Memfasilitasi aspek legalitas usaha pangan industri rumah tangga (P-IRT) sertifikat penjamah makanan (2021), melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mempermudah serta memajukan penjualan produksi dari pelaku UMKM.
- d. Menggelar Kegiatan Festival Ekonomi Kreatif Lamongan Megilan 2022, sebagai wujud komitmen Pemkab Lamongan untuk membangkitkan ekonomi pasca pandemi sekaligus memunculkan potensi ekraf Lamongan, dengan harapan pelaku UMKM dan IKM khususnya para pelajar dan milenial Lamongan yang mau berwirausaha bisa menunjukkan karya unggulan yang nantinya bisa diketahui customer dan dapat diserap pasar.
- e. Program UMKM *One Pesantren One Product* (OPOP) (2022), dengan program ini ingin mengajak semua elemen Pemuda untuk bersinergi dan berkontribusi mewujudkan *entrepreneur* muda yg punya jiwa kewirausahaan yang tinggi.

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan bermaksud untuk memacu perkembangan UMKM di wilayahnya dengan menyediakan program pengembangan UMKM yang bertujuan untuk membantu UMKM untuk berkembang menjadi salah satu penopang

pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Lamongan (Rosita, 2020).

Tahap selanjutnya dalam perencanaan pembangunan ekonomi lokal dengan memilih strategi pengembangan ekonomi lokal yang meliputi tujuan dan kriteria, mempelajari berbagai alternatif tindakan, mengembangkan strategi yang ditargetkan. Strategi pengembangan telah disusun dengan melibatkan semua stakeholder pengembangan UMKM di Kabupaten Lamongan, sehingga pendekatan yang dipilih nantinya adalah pendekatan yang komprehensif.

Hasil dari kegiatan tersebut diatas adalah analisis dan penyusunan strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Lamongan. Hasil kajian dapat menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk dapat menyusun Roadmap Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM yang lebih detail untuk mencapai strategi diatas menuju visi misi Kabupaten Lamongan.

Tujuan dari kajian penyusunan roadmap pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Lamongan ini adalah untuk akselerasi program kerja dan pembagian kewenangan lintas sectoral (antar OPD) dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Lamongan.

METODE

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu prioritas pembangunan nawa bhakti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 yaitu Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa (Khotimah, 2023). Hal ini dalam rangka mencapai misi terkait dengan Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan produktivitas sektorsektor andalan daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2027 – 2026, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu program prioritas, dalam mewujudkan misi Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah, melalui program prioritas kepala daerah yaitu :

- a. Fasilitasi Pengembangan UMKM;
- b. Fasilitasi Pengembangan IKM;
- c. Lamongan Kreatif Pesantren Kreatif (*Santripreneurship*);
- d. Bantuan Modal Pendampingan dan Pemasaran;
- e. Gerakan Membeli Produk Lamongan;
- f. Revitalisasi Pasar Desa;
- g. Membangun Sentra UMKM Lamongan;
- h. Ijin usaha PIRT Gratis bagi UMKM yang memproduksi hasil olahan serta yang hanya memiliki karyawan maksimal 3 (tiga) orang. Berdasarkan hasil telaah permasalahan dan potensi berdasarkan kinerja *existing*, memperhatikan capaian indikator SDG's untuk pemenuhan target pada tujuan pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan isu strategis prioritas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, serta hasil consensus atau kesepakatan antar stakeholder dan telah melewati forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan serta pembahasan bersama DPRD, maka rumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: Tingginya potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi kontribusi sektor pertanian, perdagangan, Industri, UMKM dan Pariwisata.

Kabupaten Lamongan memiliki potensi sektor UMKM dan Pariwisata yang harus terus dikembangkan karena memiliki trend positif. Pemerintah perlu melakukan upaya strategis dalam pengembangannya, seperti memberi stimulan modal, akses pemasaran dan pelatihan. Sedangkan untuk pengembangan potensi pariwisata strategi yang bisa dikembangkan yakni dengan pendekatan pembangunan integratif, holistik dan tematik. Upaya integrasi antara penumbuhan dan pengembangan UMKM dengan pariwisata yakni menumbuhkan ekonomi kreatif.

Dalam alternatif strategi pembangunan pada periode pembangunan RPJMD ini adalah Mendorong Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan optimalisasi penyerapan pajak dan retribusi pada sektor Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, UMKM dan industri kreatif serta penguatan Kontribusi Sektor Pertanian, perkebunan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk itu Arah Kebijakan Pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan serta mewujudkan misi Kabupaten Lamongan : Misi:

“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah”.

Kebijakan pengembangan UMKM berupa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lamongan tidak semata menjadi tugas mandiri dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tapi merupakan kolaborasi dari berbagai unit dan OPD di Pemerintah Kabupaten Lamongan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan UMKM dalam mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat Lamongan menjadi suatu program kerja yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua unit OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

Perkembangan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Lamongan, berdasarkan badan usaha yang berbentuk koperasi saat ini yang terdiri dari koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Dimana koperasi aktifnya sejumlah 1.103 dengan jumlah anggotanya sebanyak 113.580 anggota. sedangkan koperasi yang memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 744 koperasi dan yang sudah mengurus Nomor induk Berusaha (NIB) berbasis resiko sebanyak 250 koperasi. Sedangkan Perkembangan jumlah UMKM yang terdaftar di Kabupaten Lamongan saat ini berkisar 254.000, dimana UMKM yang telah memiliki nomor induk usaha beresiko sebanyak 7913 UMKM. Karena hal ini sangat penting karena dengan adanya Nomor Induk Usaha Pelaku Usaha Mikro dapat mempunyai kemudahan modal usaha dari perbankan. Di tahun 2021 terdapat UMKM yang mempunyai fasilitas KUR ini sebanyak 64.000 UMKM. Nilai total yang diberikan permodalan dari perbankan sebesar 1,8 Trilyun di Kabupaten Lamongan.

Keseriusan Pemkab Lamongan memberikan pembinaan dan penguatan kepada 1.349 Koperasi dan 254.206 unit Usaha Mikro mampu mengantarkan Kabupaten Lamongan meraih penghargaan pembinaan koperasi terbaik di Provinsi Jawa Timur bulan Juli 2022. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan yang tidak mudah, dalam mempertahankan eksistensi

koperasi dan UMKM di tengah kondisi yang tidak menentu saat ini, mulai dari pandemi Covid-19 hingga persaingan usaha yang kian ketat, sehingga mengharuskan koperasi dan UMKM melakukan berbagai inovasi agar tetap mendapat tempat dihati masyarakat.

Pemkab Lamongan tidak henti memperhatikan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Salah satunya dengan membantu dengan memberikan fasilitas permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini karena modal usaha sering menjadi masalah utama bagi para pelaku usaha, upaya ini bertujuan demi meningkatkan perekonomian kerakyatan, karena, melalui UMKM perekonomian masyarakat bisa bangkit kembali setelah terpuruk minimal dua tahun terakhir. Untuk mencapai pembangunan inklusif, UMKM menjadi pendorong dalam pertumbuhan ekonomi di Lamongan. Terbukti, pertumbuhan ekonomi yang awalnya -2,65 persen saat pandemi, kini meningkat menjadi 3,43 persen.

Hasil riset dari otoritas yang berwenang, tentang dampak pandemi terhadap UMKM, telah melaporkan bahwa menurut hasil riset BI tingkat penjualan rata-rata pada omset penjualan produk UMKM adalah sebesar 50%. Penyebabnya sebagaimana disampaikan LIPI dipengaruhi oleh keputusan 58,8% UMKM menurunkan harga untuk mempertahankan usaha. Dampak pada permodalan 40% UMKM telah gulung tikar sebagai imbas sulit mendapatkan modal kembali akibat Pandemi Covid-19. Sedangkan dampak pada distribusi, riset dari Kemenkop dilaporkan bahwa sebanyak 20,01% dan 22,90% berpengaruh pada permintaan produksi.

Berdasarkan riset terakhir total ada kurang lebih 62,84% terkendala pandemi dengan indikasi keluhan terjadi pada sektor distribusi, penurunan keuntungan penjualan dan kesulitan modal. 40% sisanya (37,16%) merupakan angka yang dilaporkan gulung tikar. Menggunakan preposisi hasil riset tersebut, data di tahun sebelumnya terkait dengan angka tenaga kerja yang terserap sampai 97% di sektor UMKM atau sebanyak 120.598.138, dibandingkan dengan Kelompok Usaha besar (KUB) yang hanya menyerap 3% atau berkisar 3.619.507 pekerja.

Saat ini semua sektor, khususnya di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sedang dihadapkan pada tantangan besar, yaitu tantangan pandemi virus Covid-19 dan

tantangan Industry 4.0. Oleh karena itu untuk dapat bertahan, pelaku UMKM perlu memiliki kemampuan manajemen dan organisasi yang baik, memastikan inovasi produk sesuai kebutuhan di masyarakat dapat diterapkan, hingga mengoptimalkan strategi pemasaran berbasis digital.

Secara kelembagaan pengembangan UMKM telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, sebagaimana pasal 6 bahwa UMKM dalam menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Tentunya dalam berbagai sektor usaha UMKM yang telah berjalan akan menyumbang pada PDRB Kabupaten Lamongan. Untuk itu program pengembangan dan pemberdayaan UMKM di kabupaten Lamongan harus terencana, terarah dan terkendali, sehingga membutuhkan peta jalur (roadmap) yang jelas yang mampu membawa visi misi Kabupaten Lamongan sebagaimana yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan.

Dalam perspektif pemberdayaan, keberadaan usaha mikro dengan segala karakteristiknya dituntut untuk menangkap peluang dalam situasi ekonomi yang sangat sulit, yaitu fleksibilitas yang tinggi, dan dengan dukungan manajemen yang memadai dalam menghasilkan produk dan jasa sehingga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya di daerah, pemerintah daerah perlu mengembangka potensi-potensi ekonomi masyarakat, khususnya koperasi dan Usaha Mikro. Mengingat koperasi dan Usaha Mikro merupakan integral dari perekonomian nasional yang mempunyai peran strategis, dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi secara luas dan penurunan angka kemiskinan, maka dipandang perlu adanya suatu *political will* dari pemerintah daerah guna melakukan upaya perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha mikro. Perkembangan UMKM dalam mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat Lamongan menjadi suatu program kerja yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua unit OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Lamongan.

Analisis SWOT

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Stabilitas Harga - Tetap menjaga stabilitas harga jual, sehingga harga jual selalu kompetitif
- b. Lingkungan - Sebagian besar produk ramah lingkungan
- c. Keunggulan Produk – Produk tahan lama, sehingga bisa menjangkau pangsa pasar diluar Kabupaten Lamongan
- d. Kondisi Geografis - Letak Lamongan berada di kawasan pesisir, sehingga potensi bahan baku utama berupa Ikan lumayan berlimpah.
- e. Ketersediaan Modal - Adanya bantuan BPUM dari Pemerintah, untuk menambah modal saat kondisi pandemi walaupun tidak semua UMKM menerima bantuan BPUM

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Ketersediaan Modal - Membutuhkan modal untuk produksi serta kesulitan untuk memperoleh pinjaman dengan bunga ringan
- b. Media Pembayaran - Sistem pembayaran masih menggunakan cash/tunai
- c. Peralatan Produksi - Peralatan produksi masih manual, sehingga perlu penambahan alat produksi yang berteknologi untuk meningkatkan kapasitas
- d. Manajemen - Manajemen masih dilakukan secara konvensional
- e. Legalitas Produk - Belum memiliki sertifikasi/izin untuk produk, seperti sertifikasi halal, BPOM, dll
- f. Keunggulan produk - Kurang inovasi dan kreatif dalam menciptakan produk
- g. Pemasaran Online - Belum menguasai marketing secara online
- h. Pangsa Pasar - Kesulitan dalam memasarkan produk
- i. Ekonomi Daerah - Karena usaha masih terbatas atau belum berkembang sehingga belum memberi dampak kesejahteraan kepada lingkungan sekitar

3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Pangsa Pasar – Perubahan gaya hidup menjadi lebih konsumtif masyarakat

saat ini menjadikan pangsa pasar cukup tinggi

- b. Pangsa Pasar - Eksport Produk UMKM
- c. Mitra Kerjasama – Hubungan dengan pemasok yang baik
- d. Kebijakan Pemerintah - Penjualan Produk melalui franchise ritel (Indomaret, Alfamart, dll)
- e. Kebijakan Pemerintah - Peluang ekspor produk ke luar negeri
- f. Kondisi Geografis - Letak Lamongan dilintasi jalur utama pantura menghubungkan Jakarta-Surabaya. Sepanjang pesisir utara Jawa memiliki banyak tempat pariwisata
- g. Asosiasi/organisasi UMKM - Eksistensi Asosiasi/organisasi UMKM dapat menjadi media diskusi terkait pengembangan produk dan bisnis
- h. Penyuluhan/Program pendukung pengembangan usaha - Pemerintah memberikan Penyuluhan/Program kurasi untuk pendukung pengembangan UMKM

4. Ancaman (*Threat*)

- a. Tenaga Kerja - Kurangnya minat tenaga kerja bekerja di UMKM dibandingkan dengan industri/pabrik
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia - Kualitas SDM yang belum mumpuni
- c. Infrastruktur - Akses jalan dan penerangan lampu jalan yang kurang memadai
- d. Hambatan Produksi - Adanya penyakit dan hama untuk UMKM berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan
- e. Pandemi yang berefek pada penurunan daya beli masyarakat sehingga penjualan menurun
- f. Profit yang diperoleh menurun karena harga jual tetap/kompetitif sedangkan harga bahan pokok naik
- g. Daya Saing - Kompetisi yang menyebabkan terjadinya perang harga (harga menjadi murah/turun)
- h. Media Pemasaran Offline - Adanya pemasaran offline seperti bazar, pameran dan sejenisnya memerlukan biaya operasional yang banyak untuk angkut produk, penginapan, operasional dan lain-lain sedangkan harga jualnya harus tetap kompetitif agar laku
- i. Kondisi Geografis - Kurang cocok untuk

UMKM berbasis tanaman perkebunan (kopi, teh, dll)

5. Strategi *Turn Around*

Berdasarkan hasil analisa SWOT yang telah dirumuskan pada kajian sebelumnya, alternatif strategi untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Lamongan adalah Strategi *Turn Around* dengan penerapan strategi sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan internal UMKM di Kabupaten Lamongan
- b. Memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM mengenai tata cara mengelola usaha, sistem pembayaran non cash, inovasi dan kreatif dalam menciptakan produk, packaging, dan branding, serta marketing secara online
- c. Memberikan bantuan dasar atau pengetahuan berusaha kepada para pelaku UMKM seperti kemudahan akses permodalan, peralatan produksi yang berteknologi, serta bantuan percepatan dalam proses pengurusan legalitas produk
- d. Mengimplementasikan program kurasi UMKM untuk mendorong UMKM menjadi UMKM dengan standar operasional dan produk yang siap untuk memiliki sertifikasi dan perizinan produk dan usaha
- e. Membangun kerjasama dengan lembaga keuangan mikro untuk memberikan pendanaan bagi UMKM dengan pengawasan dan monitoring dari pemerintah melalui dinas terkait
- f. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan-pelatihan dan mendorong Asosiasi UMKM dan para pelaku UMKM untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan usahanya sehingga akan memberi dampak kesejahteraan kepada lingkungan sekitar
- g. Memberikan penyuluhan dan pendampingan secara menyeluruh kepada para Asosiasi/Organisasi UMKM dan para pelaku UMKM
- h. Membentuk program untuk membantu pemasaran produk UMKM baik secara offline maupun online, baik secara lokal, regional, nasional, maupun internasional(ekspor).

Roadmap UMKP

Strategi dan Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, dalam mencapai pembangunan lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran.

1. Strategi

- a. Tingginya Potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi kontribusi sektor pertanian, perdagangan, Industri, UMKM dan Pariwisata
- b. Perlunya penanganan kemiskinan terpadu melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan memberikan jaminan perlindungan sosial.

2. Arah Kebijakan RPJMD

- a. Meningkatnya pemberdayaan dan pendapatan masyarakat
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggul
- d. Meningkatnya belanja wisatawan
- e. Meningkatnya realisasi investasi

3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

- a. Memberikan kemudahan perizinan usaha koperasi
- b. Memberikan Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan skil pelaku usaha mikro
- c. Memberikan Sosialisasi terkait kemudahan akses permodalan
- d. Fasilitasi Pembuatan legalitas produk beserta design produknya
- e. Melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan dan non Perbankan.

Pemetaan Roadmap UMKM

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah, maka peta jalan/ roadmap UMKM 2023-2026 dibagi dalam tahapan usulan tema sebagai berikut:



Gambar 1 Peta Jalan UMKM

Dukungan dan Sinergitas Lintas Sektor

Dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan dan sasaran yang ingin dicapai perlu adanya dukungan dari berbagai pihak terutama adanya keberpihakan pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah dengan berbagai kebijakan dan peraturan yang memberikan sebuah kepastian dan kemudahan untuk berusaha terutama bagi UMKM. Di samping perlu adanya bantuan pembinaan dan pelatihan terutama pelatihan kewirausahaan dan pelatihan teknologi, sehingga dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan dapat menciptakan proses bisnis yang lebih efisien serta dapat memperluas pasar produk yang dihasilkan yaitu dapat menembus pasar global.

Namun yang lebih penting dalam operasional UMKM adalah perlu adanya sinergitas dari semua pelaku UMKM dalam menciptakan efisiensi dan mampu menciptakan peluang serta mampu merebut peluang yang tersedia dalam era persaingan yang semakin ketat, seperti terlihat gambar berikut:



Gambar 2 Dukungan dan Sinergitas Lintas Sektor

Dukungan Kelembagaan

Dalam melakukan usaha, umumnya para pelaku bisnis sering dihadapkan dengan masalah dana. Untuk itulah perlu adanya perhatian pemerintah dengan kebijakannya dapat menyediakan fasilitas keuangan yang berupa penyediaan kredit dengan bunga yang rendah dan jangka waktu yang panjang lewat dukungan lembaga Bank dan lembaga keuangan lainnya. Di samping perlu adanya pola kemitraan yang berupa sistem Bapak asuh yang membantu pendanaan, dan memantu untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM. Adapun skemanya dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 3 Dukungan Kelembagaan UMKM

Regulasi terkait UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu prioritas pembangunan nawa bhakti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 yaitu Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Hal ini dalam rangka mencapai misi terkait dengan Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan produktivitas sektor-sektor andalan daerah.

Sesuai tema pembangunan Kabupaten Lamongan rencana kerja tahun anggaran 2022 yakni Pemantapan Sosial Ekonomi dan Peningkatan Layanan Dasar Serta Penyediaan Infrastruktur Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Lamongan akan menysar peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif melalui program peningkatan nilai tambah ekonomi kerakyatan menjadi prioritas pembangunan pada APBD 2022. Selain peningkatkan ekonomi, menurutnya arah kebijakan belanja daerah rancangan APBD 2022 juga diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan produktivitas dan daya saing

ketenagakerjaan disertai perluasan kesempatan kerja.

Capaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ditandai pula dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) senilai Rp. 41.04 Triliun dan PRDB per kapita sebesar 30,27 Juta. Capaian yang membaik juga didapat pada indikator Indeks Gini yakni 0,292 yang berarti menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat terus tercapai. Sehubungan dengan itu tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 0,24% dari 5,13% yang menandakan membaiknya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan. Sebesar 82,54 telah dicapai pada indeks Kinerja Infrastruktur. Pada indeks Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 96,57%.

Pertumbuhan perekonomian tahun 2022 ini juga mampu mendongkrak untuk Rancangan APBN Tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,13, dibandingkan di tahun 2022 target tersebut mengalami beberapa perubahan mulai dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) naik 2%, Pendapatan Transfer naik sebesar 4%, dan Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar 50%. Terdapat 3 hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan rencana APBD yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan, yakni perkembangan ekonomi makro, regional, dan daerah. Hal ini penting diperhatikan, karena ekspektasi perencanaan pembangunan sangat berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian, pengurangan kemiskinan, dan mengatasi dampak inflasi sebagai implikasi dari kondisi global yang masih bergejolak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan peta jalan/ roadmap UMKM Kabupaten Lamongan Tahun 2023-2026 dibagi dalam tahapan berikut:

1. Penguatan Kelembagaan

- a. Pendataan/pembuatan database UMKM terintegrasi Pengembangan digital platform bagi UMKM untuk kemudahan akses permodalan, pemutakhiran data pelaku UMKM, program pelatihan, pemberian insentif, dll.)
- b. Penataan Organisasi, Badan Hukum,

dan Perijinan Tatalaksana UMKM

- c. Sosialisasi kebijakan dan advokasi kelembagaan UMKM

2. Produktivitas dan Aksesibilitas UMKM

- a. Pengembangan/ inovasi produk UMKM
- b. Standarisasi produk UMKM
- c. Pengembangan jaringan, kerjasama pemasaran dan sarana promosi produk UMKM Pengembangan skema pembiayaan dan investasi bagi UMKM (lembaga keuangan bank dan non-bank)
- d. Pertumbuhan akses pembiayaan UMKM (lembaga keuangan bank dan non-bank)

3. Akselerasi Digital UMKM

- a. Perluasan jangkauan pemasaran
- b. Peningkatan akselerasi pembayaran digital/ nontunai
- c. Transformasi digital UMKM dalam hal sistem pemasaran, sistem pembayaran, sistem operasional, dan sistem logistik.

4. Pengembangan UMKM Berkelanjutan

- a. Pertumbuhan Jumlah UMKM baru
- b. Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Naik Kelas

REKOMENDASI

Saran yang dapat diberikan agar mendukung penelitian selanjutnya yaitu pemerintah dapat terus mendukung pengembangan UMKM dengan membuat regulasi atau kebijakan yang mendukung perkembangan UMKM di Kabupaten Lamongan terus berkembang. Selain itu edukasi pentingnya UMKM juga dapat dilakukan untuk menambah jumlah UMKM di Kabupaten Lamongan sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran.

DAFTAR USTAKA

- Abas, A. R. H. (2020). Upaya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sulawesi Tengah Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) Rumah Coklat Kota Palu Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Diss. IAIN Palu*.
- Khotimah, D. R. K. (2023). Inclusive Economy Acceleration: Optimize The Existence and Export Opportunity of Village Based Superior Product. *East Java Economic Journal*, 7(2), 196–216.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2).
- Nasution, L. (2020). Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKMDi Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal 'Adalah*, 4(1).
- Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109.
<https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>
- Sopian, H. (2023). Urgensi Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan pada Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Media Birokrasi*, 133–154.
- Tarigan, R. (2009). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Cetakan Kelima. PT Bumi Aksara.
- Zaelani, I. R. (2019). Peningkatan daya saing UMKM Indonesia: Tantangan dan peluang pengembangan IPTEK. *Jurnal Transborders*, 3(1), 15.